

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aries Mujiburohman, Dian. (2019). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Cholid, Narbuko. (2010). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: SAGE Publications.
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi. (2003). *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, Eddy OS. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Harahap, Yahya. (2004). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya. (2008). *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksa Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Siti Soemarti. (1981). *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabet.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Kartono. (1974). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kadir, A. (2012). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri Bandung.
- Lontoh, Rudy A & et. al (editor). (2001). *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.

- Mappong, H. Zainuddin. (2010). *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Martokusumo, Sudikno. (2009) *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atrna Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1988). *Hukum Acara Perdata*. Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, M. S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono.(1984) *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan*, Jakarta: Penerbit Sumur Bandung.
- Riduan, Syahrani. (2000). *Buku materi dasar hukum acara perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2010). *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum - Universitas Sebelas Maret.
- Sinaga, Syamsudin Manan. (2014). *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media Printing.
- Suyatno, Anton. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Ctk.Pertama, Jakarta: Kencana.
- Syahuri, D. T., & SH, MH. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Prenada Media.
- Sarwono, H.A. P. (2011) *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika Jakarta.
- Sastrawidjaja, Man S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.

- Soekanto, Soerjono. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Cet. V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shubhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sutantio, Retnowulan & Iskandar Uripkarta Winata. (1983) "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Penerbit Alumni Bandung.
- Soekarso, Victor Situmorang. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Rachmadi.(2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, A. T. (2014). *Hukum acara peradilan agama: dilengkapi contoh surat-surat dalam praktik hukum acara di peradilan agama*. Penerbit Mandar Maju.

Jurnal

- Asmara, T. T. P., Ikhwansyah, I., & Afriana, A. (2019). Ease of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 118-136.
- Muhajir, M. P. Z. (2019). Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal. *Notaire*, 2(1), 49-74.
- Shubhan, M. H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 519-539.
- Syahuri, Taufiqurrohman. "Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.4 (2010): 513-529.

Makalah/Tesis/Disertasi

Asshiddiqie, Jimly “Cita Negara Hukum Indonesia”, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya”, Palembang: Universitas Sriwijaya, 20 November 2022.

Ridlwani, M. P. 2019. Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat Pkpu Gagal Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 PK/Pdt. Sus-Pailit/2014. Surabaya: Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4316.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4443.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5076.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6554.

Peraturan Pemerintah SEMA Nomor 10 Tahun 2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt-Sus-Pailit/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Internet/Sumber Lainnya.

Amira, *Tinjauan Hukum kepailitan*, sebagaimana diakses pada (digilib.unila.ac.id) tanggal 6 Juni 2023

Heriani, Fitri Novia., Moratorium PKPU Dinilai untuk Selamatkan Ekonomi di Tengah Pandemi, diakses pada 10 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6127975931f88/moratoriumpkpu-dinilai-untuk-selamatkan-ekonomi-di-tengah-pandemi/?page=all>.

<https://bisnis.tempo.co/read/1499678/terkini-bisnis-95-persen-pengajuan-pkpu-hingga-deretan-ekspansi-digital-airasia>., Apindo: 95 Persen yang

Mengajukan PKPU Adalah Kreditur, diakses tanggal 6 Juni 2023.

<https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat>. diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Susanto, Vendy Yhulia., Setahun Pandemi, Tren Permohonan PKPU Meningkat,

<https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat>.

diakses pada tanggal 10 Mei 2023.